

**EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI BAGI PENCARI KERJA DI DINAS
TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD ALGHIFARI KUSUMANINGRAT
NPM 2116041097**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI BAGI PENCARI KERJA DI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Muhammad Alghifari Kusumaningrat

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis digital yang ditujukan kepada pencari kerja. Di Provinsi Lampung, implementasi program ini masih menghadapi beberapa permasalahan, seperti keterbatasan akses digital di daerah terpencil, kurangnya relevansi beberapa materi pelatihan dengan kebutuhan industri lokal, serta keterbatasan pendampingan selama proses pelatihan daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Provinsi Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam peningkatan kompetensi pencari kerja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini secara umum memiliki fondasi dan dukungan pelaksanaan yang baik, terutama dari sisi anggaran dan kemitraan dengan lembaga pelatihan. Namun, masih terdapat kelemahan dari segi pelaksanaan proses pelatihan daring, kurangnya praktik lapangan, serta kesenjangan antara pelatihan dengan dunia kerja. Faktor pendukung dalam pelaksanaan program ini meliputi adanya dukungan regulasi, dan penyedia pelatihan digital yang terverifikasi. Sementara itu, faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya bimbingan pasca pelatihan, serta belum optimalnya penyesuaian pelatihan dengan kebutuhan industri lokal.

Kata kunci: Evaluasi program, Kartu Prakerja, kompetensi, pencari kerja, Provinsi Lampung.

ABSTRACT

EVALUATION OF THE PRE-EMPLOYMENT CARD PROGRAM IN IMPROVING JOB SEEKERS' COMPETENCIES IN LAMPUNG PROVINCE

By

Muhammad Alghifari Kusumaningrat

The Pre-Employment Card Program was one of the Indonesian government's strategic initiatives aimed at improving the quality of human resources through digital-based training, specifically targeted at job seekers. In Lampung Province, the implementation of this program still faced several challenges, including limited digital access in remote areas, the lack of alignment between training materials and local industry needs, as well as inadequate mentoring during online training sessions. This study aimed to evaluate the implementation of the Pre-Employment Card Program in Lampung Province and to identify supporting and inhibiting factors in improving job seekers' competencies. This research used a qualitative descriptive approach, applying the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model by Stufflebeam. The findings indicated that the program had a solid foundation and proper implementation support, particularly in terms of budget allocation and cooperation with certified training providers. However, weaknesses remained in the training process, such as the lack of practical training, limited post-training guidance, and misalignment with labor market demands. Supporting factors included regulatory support and verified digital training platforms, while inhibiting factors involved technological infrastructure limitations, lack of mentoring, and the need for better alignment of training content with local industry needs.

Keywords: *Program evaluation, Pre-Employment Card, competency, job seekers, Lampung Province.*

Judul Skripsi : **EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI
BAGI PENCARI KERJA DI DINAS TENAGA
KERJA PROVINSI LAMPUNG**

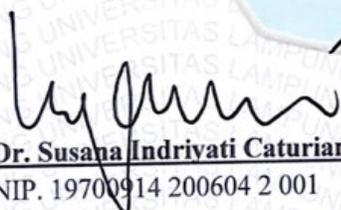
Nama Mahasiswa : **Muhammad Alghifari Kusumaningrat**

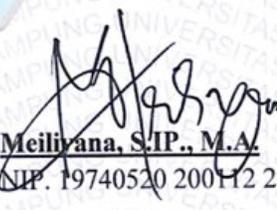
Nomor Pokok Mahasiswa : **2116041097**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

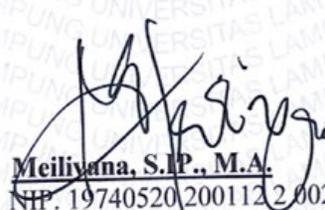
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.
NIP. 19700914 200604 2 001


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.

Sekretaris : Meilyana, S.IP., M.A.

Penguji : Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



[Handwritten signatures of Dr. Susana Indriyati Caturiani and Meilyana]

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821200032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Alghifari Kusumaningrat
NPM. 2116041097

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 22 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Mohamad Ferdiansyah dan Vera Novitasari. Pendidikan formal dimulai di TK Aisyiyah, Kota Metro, yang diselesaikan pada tahun 2008. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Palapa, Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 25 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2017, kemudian dilanjutkan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjalani masa studi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) pada bidang Minat dan Bakat (MIKAT) periode 2022–2024. Pada Januari hingga Februari 2024, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 36 hari di Desa Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, penulis juga melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung pada bulan Juni hingga Agustus 2024 sebagai bentuk penguatan kompetensi di bidang administrasi publik.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS Ar-Ra’d: 11)

“You have to fight to reach your dream.

You have to sacrifice and work hard for it.”

(Lionel Messi)

“If you give up once, it becomes a habit.

Never give up.”

(Khabib Nurmagomedov)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat sehat, akal, serta kesempatan yang telah diberikan. Dia-lah pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap langkah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga karya ini dapat menjadi amal ilmu yang bermanfaat. Dengan penuh ketulusan dan rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda Mohamad Ferdiansyah dan Ibunda Vera Novitasari

Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa, didikan, serta pengorbanan yang tiada henti. Dukungan dan semangat yang kalian berikan telah menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan keikhlasan kalian dengan keberkahan yang berlimpah.

Seluruh Dosen, Staf, dan Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Terima kasih atas ilmu, bantuan, kebersamaan, dan kenangan berharga selama masa studi. Semoga kebaikan yang kalian berikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

Tempat saya menimba ilmu dan membentuk karakter, semoga selalu menjadi rumah bagi generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berdaya saing.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya. Berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua tercinta, serta semangat dan ketekunan yang terus diupayakan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI BAGI PENCARI KERJA DI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG." Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N.) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, semua hambatan tersebut dapat dilalui dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan ketulusan, kesabaran, dan ketegasan yang penuh kebaikan telah membimbing penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan yang jernih, pemahaman yang luas, serta dukungan yang tidak pernah putus, yang telah menjadi penuntun berharga bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ibu dalam setiap langkah pengabdian dan kebaikan yang Ibu curahkan.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta motivasi yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih

juga atas perhatian dan kebijakan yang telah Ibu berikan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap amanah yang Ibu jalankan.

3. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D., selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan ilmu yang telah Ibu berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah dan pengabdian Ibu.
4. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih atas segala dukungan, kebijakan, dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa, khususnya penulis, selama menempuh pendidikan di lingkungan FISIP Unila. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam memimpin dan mengembangkan fakultas tercinta ini.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas pelayanan akademik dan bantuan administratif yang telah diberikan selama penulis menjalani proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberi kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan amanah.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran dalam mendidik serta membentuk karakter kami sebagai mahasiswa. Penulis juga memohon maaf apabila selama proses perkuliahan pernah melakukan kesalahan, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Semoga ilmu

yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan memberi manfaat yang luas bagi kehidupan penulis di masa mendatang.

7. Staf Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Mbak Wulan dan Mbak Uki, terima kasih atas segala bantuan, keramahan, dan ketulusan dalam melayani berbagai keperluan administrasi penulis, mulai dari awal menjadi mahasiswa baru hingga tahap akhir penyelesaian studi. Doa terbaik penulis untuk kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan Mbak Wulan dan Mbak Uki.
8. Ibunda Vera Novitasari, S.E., M.M., sosok perempuan luar biasa yang menjadi pelita dalam setiap langkah kehidupan penulis. Ibu adalah tempat berpulang segala lelah, sumber kekuatan dalam setiap ujian, dan doa yang tak pernah henti mengiringi sejak awal kehidupan hingga detik ini. Terima kasih atas cinta yang tak bersyarat, kesabaran tanpa batas, ketegaran dalam menghadapi segala cobaan, serta nasihat yang senantiasa menjadi penuntun dalam perjalanan hidup penulis. Maafkan jika penulis belum sepenuhnya menjadi sosok yang Ibu harapkan. Dengan segenap kesadaran, penulis akan terus berusaha memperbaiki diri, tumbuh menjadi pribadi yang membanggakan, membawa manfaat bagi sesama, dan menjadi anak yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan bagi Ibu, baik di dunia maupun di akhirat.
9. Ayah Mohamad Ferdiansyah, S.E., sosok ayah luar biasa yang menjadi panutan sejati dalam hidup penulis. Beliau adalah figur teladan, pekerja keras, penyemangat tanpa henti, dan pelindung yang selalu hadir dalam setiap fase kehidupan. Terima kasih atas bimbingan, ketegasan yang mendidik, dan kasih sayang yang tak pernah berkurang sejak penulis kecil hingga dewasa. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap peluh yang tercurah demi masa depan keluarga, dan setiap nasihat yang menjadi penuntun langkah. Maafkan penulis jika belum sepenuhnya mampu mewujudkan harapan dan cita-cita yang Ayah titipkan. Dengan segenap kesadaran, penulis akan terus belajar

menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, dan membanggakan, agar segala pengorbanan Ayah tak pernah sia-sia dan menjadi amal jariyah yang mengalir abadi.

10. Aqila Nurul Aziza dan Muhammad Al Farrel, dua adik tersayang yang selalu membawa warna dalam hidup penulis. Terima kasih atas canda, tawa, dan kehangatan yang kalian hadirkan di setiap momen menjadi penghapus lelah dan sumber semangat tersendiri di tengah perjalanan yang penuh tantangan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian. Doa terbaik selalu menyertai, semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang shalih dan shalihah, cerdas, rendah hati, serta mampu mewujudkan cita-cita mulia dan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat terbaik di Basecamp Afif, Agung, Andhika, Ari, Bima, Dian, Duta, Dwi, Fajar, Fido, Figo, Ihsan, Naufal, Pachri, dan Satriono. Kalian adalah bagian tak tergantikan dalam perjalanan panjang penuh cerita, tawa, dan perjuangan. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai selama masa perkuliahan. Kita pernah melewati malam-malam penuh tugas, pagi dengan canda, dan siang yang dipenuhi harapan. Meski waktu akan membawa kita pada garis kehidupan masing-masing, namun ikatan persaudaraan ini akan selalu hidup dan tumbuh di dalam jiwa. Semoga langkah kita ke depan penuh dengan keberkahan dan kesuksesan, serta tetap saling mendoakan dalam setiap jalan yang kita pilih.
12. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman seperjuangan yang luar biasa Amel, Ruweisha, Pinka, Shafwan, Theresia, dan Velly. Terima kasih atas semangat, bantuan, kebersamaan, dan doa yang tak henti-hentinya dalam setiap proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kalian adalah sosok hebat yang telah mewarnai perjalanan akademik penulis dengan

ketulusan, tawa, dan saling menguatkan. Semoga kebaikan yang telah kalian tanam menjadi keberkahan yang terus mengalir, dan semoga kita semua dimudahkan dalam meraih cita dan tujuan hidup masing-masing.

13. Kepada Salsabila Murtaja Harits, terima kasih telah menjadi sosok yang senantiasa menghadirkan semangat dan ketenangan dalam setiap langkah penulis. Kehadiranmu bagaikan cahaya lembut yang menuntun di kala gelap, memberi energi saat semangat mulai meredup, dan menjadi alasan untuk terus melangkah meski hari terasa berat. Dalam diam atau dalam kata, dalam tawa atau dalam jeda, hadirimu adalah kekuatan yang tak selalu terlihat tapi nyata terasa. Semoga setiap doa baikmu kembali sebagai keberkahan berlipat dalam hidupmu, dan segala kebaikan yang kamu tebarkan menjadi bagian dari jalan terangmu menuju masa depan yang gemilang.
14. Mbak, Abang, dan seluruh rekan-rekan Himagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap momen, proses, dan kenangan berharga yang telah terukir bersama. Semoga semangat kebersamaan dan jaringan relasi yang telah dibangun dapat menjadi pintu terbukanya kebermanfaatan di masa kini dan masa depan, serta menjadi jembatan silaturahmi yang tak lekang oleh waktu.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, pemikiran, saran, serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi amal berlipat dan dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, serta keberkahan di mana pun kalian berada.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Muhammad Alghifari Kusumaningrat

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik.....	14
2.3 Tinjauan Tentang Program	16
2.4 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan.....	17
2.5 Tinjauan Tentang Kartu Prakerja	22
2.6 Tinjauan Tentang Kompetensi	25
2.7 Kerangka Pikir.....	25
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Tipe Penelitian.....	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Teknik dan Pengumpulan Data	30
3.6 Teknik Analisis Data	32
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Deskripsi Wilayah Provinsi Lampung	36
4.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	38
4.2.1 Profil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	38
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	38
4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	40
4.3 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	41
4.3.1 Evaluasi Konteks Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	42
4.3.2 Evaluasi Input Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	54
4.3.3 Evaluasi Proses Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	65
4.3.4 Evaluasi Produk Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.....	75
V. PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	10
2. Daftar Informan Penelitian	31
3. Daftar Dokumen yang berkaitan dengan penelitian.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah & Persentase Pengangguran di Indonesia tahun 2020-2023	3
2. Jumlah Pengangguran di Asia Tenggara pada tahun 2024	5
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7
4. Stufflebeam (2003) CIPP Model.....	18
5. Kerangka Pikir	26
6. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	40
7. Mitra Pelatihan Daring Program Kartu Prakerja.....	57
8. Alur Pendaftaran Program Kartu Prakerja	68
9. Bidang Pelatihan Paling Diminati di Provinsi Lampung	77
10. Sertifikat Pelatihan Dari Lembaga Pelatihan BisaMahir	79

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada pidatonya tanggal 16 Agustus 2019, Presiden menyampaikan penjelasan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 beserta Nota Keuangannya. Pada kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa peningkatan daya saing nasional merupakan salah satu faktor utama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Upaya ini perlu diarahkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang menjadi landasan penting bagi pertumbuhan dan pembangunan nasional.

Kebijakan fiskal tahun 2020 mengusung tema "APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia," yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah peluncuran Program Kartu Prakerja, yang difokuskan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan anggaran sebesar Rp.8-10 triliun. Program ini dirancang untuk membekali tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan dan kompetensi yang unggul, sehingga mampu bersaing di pasar kerja domestik yang semakin kompetitif dan menuntut kualitas tinggi.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor mendesak. Pertama, terdapat ketimpangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan dunia kerja di Indonesia, di mana sekitar 63 persen lulusan pendidikan formal tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kedua, perkembangan revolusi industri telah menimbulkan kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja saat ini dan kebutuhan masa depan. Ketiga, Indonesia diproyeksikan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030-2040, yang menuntut kesiapan tenaga kerja

berkualitas. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali faktor mendesak lainnya serta kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan program ini. Pendekatan ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna mencapai tujuan Program Kartu Prakerja (Prasetyo, 2019:7).

Program Kartu Prakerja adalah inisiatif pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat, terutama kelompok miskin dan pengangguran, dengan menyediakan pelatihan keterampilan kerja serta insentif pasca-pelatihan. Program ini memanfaatkan peran aktif lembaga pelatihan, baik yang dikelola oleh kementerian/lembaga (K/L) maupun sektor swasta. Kehadiran Kartu Prakerja bertujuan untuk menjawab keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan pekerjaan serta kesenjangan antara pendidikan atau keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Kebijakan Kartu Prakerja, yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020, bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja. Program ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi kerja melalui pelatihan dan pemberian insentif, dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan serta mendorong terciptanya wirausaha baru. Sasaran program meliputi pencari kerja, pekerja atau buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pekerja atau buruh yang memerlukan peningkatan keterampilan. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan, yaitu warga negara Indonesia berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Dana program dialokasikan untuk membiayai pelatihan, memberikan insentif pencarian kerja, serta insentif pengisian survei evaluasi. Dalam implementasinya, program ini melibatkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaannya.

Program Kartu Prakerja dirancang untuk meningkatkan keterampilan berbagai kelompok tenaga kerja, seperti pencari kerja baru, pekerja yang beralih profesi, dan mereka yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui peningkatan keterampilan ini, peserta program diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga

kerja yang sejalan dengan permintaan industri. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Berikut ini adalah data jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020-2023:



Gambar 1. Jumlah & Persentase Pengangguran di Indonesia tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2023) diakses pada 1 September 2024

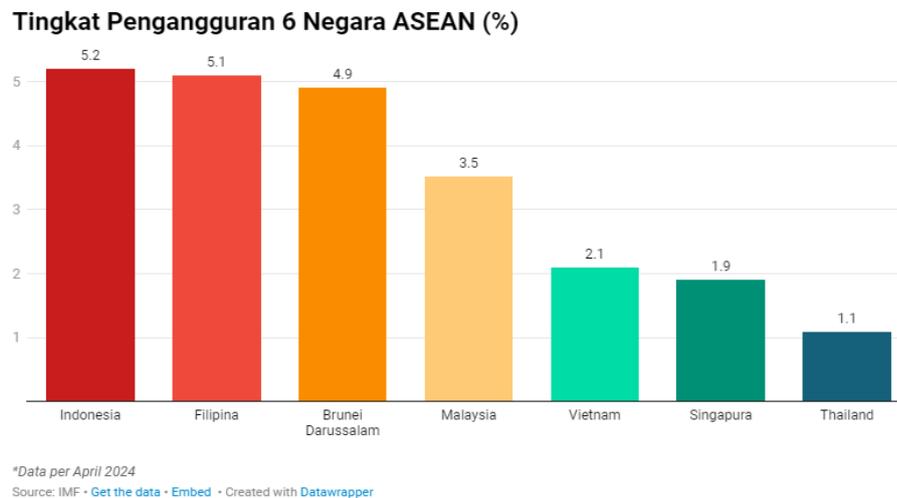
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan tren yang bervariasi antara tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2022, TPT tercatat sebesar 5,83%, yang sedikit meningkat menjadi 5,86% pada Agustus 2022. Namun, memasuki tahun 2023, terdapat penurunan yang signifikan, dengan TPT mencapai 5,45% pada Februari 2023 dan lebih lanjut menurun menjadi 5,32% pada Agustus 2023. Penurunan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, meskipun tantangan dalam penyerapan tenaga kerja masih tetap ada. Data ini memberikan gambaran positif mengenai perbaikan

kondisi pasar kerja di Indonesia, meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi angka pengangguran lebih lanjut.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja telah mencatat sejumlah pencapaian yang signifikan. Salah satu keberhasilan utamanya adalah aspek inklusivitas, di mana program ini berhasil menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang sering kali kurang terwakili, seperti penyandang disabilitas, individu yang hanya berpendidikan hingga SD atau belum tamat, serta masyarakat pedesaan. Selain itu, program ini turut berkontribusi dalam mempercepat inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat di lapisan bawah. Keberhasilan lainnya adalah terciptanya skema pelatihan yang efektif, dengan melibatkan lebih dari 150 penyedia pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.000 jenis kursus, termasuk pemasaran, entri data, pembukuan, layanan pelanggan, dan keterampilan dasar komputer perkantoran. Berdasarkan survei evaluasi, program ini telah meningkatkan keterampilan 88,9% pesertanya dalam dua tahun terakhir. Selain itu, survei juga mencatat bahwa 30% peserta yang sebelumnya menganggur kini telah berhasil memasuki dunia kerja (ekon.go.id).

Pada tahun 2023, Program Kartu Prakerja kembali menggunakan skema normal dan bermitra dengan 245 lembaga Pelatihan untuk menawarkan lebih dari 1.216 jenis pelatihan. Pelatihan tersebut mencakup metode tatap muka (*luring*) maupun webinar (*daring*) dengan berbagai kategori, seperti *greenskills*, keterampilan digital termasuk kecerdasan buatan, serta bidang yang mendukung hilirisasi. Tingkat partisipasi peserta meningkat sebesar 14,29% dari target awal. Studi Definit dari *Asian Development Bank (ADB)* juga mengonfirmasi dampak positif program ini, dengan 95% peserta melaporkan adanya peningkatan peluang kerja. Berdasarkan evaluasi yang positif dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas, program ini diputuskan untuk dilanjutkan pada tahun 2024.

Dengan demikian, Program Kartu Prakerja telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat Indonesia, serta mempromosikan pengetahuan dan kewirausahaan. Meskipun masih ada beberapa kritik terkait efektivitas dan inklusivitas, keberhasilan program ini telah jelas terlihat dalam capaian-capaian yang telah dicapai.



Gambar 2. Jumlah Pengangguran di Asia Tenggara pada tahun 2024

Sumber: CNBC Indonesia (2024) diakses pada 1 September 2024

Berdasarkan data yang ada, Indonesia mencatat tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara ASEAN, yakni sebesar 5,2 persen, diikuti oleh Filipina dengan 5,1 persen, dan Brunei Darussalam dengan 4,9 persen. Angka ini mencerminkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal pengangguran dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand, yang memiliki tingkat pengangguran lebih rendah. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, tingginya angka pengangguran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia berkurang sebanyak 350 ribu orang hingga Februari 2022, yang terlihat dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,83 persen. Namun, tantangan signifikan tetap ada, terutama tingginya TPT di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 8,63 persen, tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Hal ini menjadi ironi, mengingat SMK dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja. Menteri Bambang Brojonegoro menjelaskan bahwa tingginya pengangguran di kalangan lulusan SMK disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan nyata di pasar tenaga kerja.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) sekaligus memastikan bahwa infrastruktur yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendorong produktivitas serta mendukung transformasi menuju industrialisasi. Langkah-langkah seperti peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja diharapkan mampu menjadi solusi efektif untuk menekan angka pengangguran.

Program Kartu Prakerja dinilai memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, meskipun pemerintah tidak menjamin penempatan kerja secara langsung. Fokus utama program ini adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja agar peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih besar. Proses pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh individu dengan mengisi data pribadi melalui situs resmi prakerja.go.id, menggunakan identitas yang valid sebagai persyaratan utama. Setelah dinyatakan lolos seleksi, peserta diwajibkan memilih dan menyelesaikan pelatihan yang tersedia. Selanjutnya, dana insentif akan dicairkan melalui rekening bank yang telah terdaftar atau layanan dompet elektronik (*e-money*). Diluncurkan pada April 2020, program ini menargetkan 17,5 juta peserta dengan pembukaan gelombang baru secara berkala, termasuk gelombang 64 yang dijadwalkan pada awal Maret 2024 ([Prakerja.go.id](https://prakerja.go.id)).

Di Provinsi Lampung meskipun kebijakan ini memiliki dampak positif dalam mengurangi pengangguran, tidak semua penerima mendapatkan manfaat penuh dari program tersebut. Beberapa penerima hanya memanfaatkan *reward* tanpa melakukan pengembangan diri atau memanfaatkan ilmu dari pelatihan yang disediakan. Masalah juga muncul terkait ketidaksesuaian antara kebutuhan penerima dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan program secara optimal.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Provinsi Lampung telah berjalan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Di Kota Bandar Lampung, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa 6 dari 10 peserta program mengalami peningkatan produktivitas setelah mengikuti pelatihan yang ditawarkan.

Meskipun demikian, tantangan dalam pelaksanaan program ini masih ada, termasuk kurangnya literasi digital di kalangan peserta dan koneksi internet yang tidak stabil, yang menghambat akses mereka terhadap pelatihan daring. Dinas Tenaga Kerja setempat berperan dalam sosialisasi program, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau lebih banyak calon penerima manfaat. Selain itu, dana insentif yang diterima oleh peserta juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendanai usaha kecil, menunjukkan dampak positif dari program ini terhadap perekonomian lokal. Dengan dukungan terus-menerus dari pemerintah daerah dan lembaga pelatihan, diharapkan Kartu Prakerja dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Lampung.

Program Kartu Prakerja telah diterapkan di seluruh provinsi dan kota di Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Lampung. Namun, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung masih menunjukkan angka yang relatif tinggi. Berikut ini adalah data mengenai tingkat pengangguran pada periode 2022-2024:



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024) diakses pada 1 September 2024

Data menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat pengangguran, khususnya di Provinsi Lampung, tetap menjadi perhatian pemerintah meskipun berbagai program telah diluncurkan untuk mengatasinya, salah satunya adalah Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan data terbaru, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,12 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen poin dibandingkan dengan Februari 2023. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa permasalahan pengangguran belum sepenuhnya teratasi. Penurunan ini dapat menjadi indikasi awal adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, yang kemungkinan turut dipengaruhi oleh implementasi program pelatihan seperti Kartu Prakerja.

Program Kartu Prakerja diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan para pencari kerja, terutama di Provinsi Lampung, sehingga mereka lebih mampu bersaing di pasar kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran yang masih tinggi. Namun, di Provinsi Lampung, program ini masih menghadapi beragam tanggapan dari masyarakat, dengan sebagian yang belum memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal. Tingginya angka pengangguran mengindikasikan bahwa keberadaan Kartu Prakerja saja belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan tenaga kerja.

Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menjamin kesejahteraan para pekerja, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai peran Program Kartu Prakerja dalam memenuhi hak-hak tenaga kerja menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program tersebut dengan judul "Evaluasi Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung."

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kompetensi bagi pencari kerja di Provinsi Lampung? (Studi evaluasi program Kartu Prakerja).

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan hasil evaluasi pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan wawasan kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta motivasi untuk penelitian selanjutnya dalam hal evaluasi Program Kartu Prakerja. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat memperkaya evaluasi program secara lebih luas, terutama dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik berbasis pelatihan digital dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki program-program peningkatan kompetensi dan daya saing pencari kerja, khususnya melalui pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berfokus pada tema Evaluasi Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti telah meninjau berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik tersebut. Tiga penelitian terdahulu dipilih sebagai bahan perbandingan dan disajikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Asmiati (2022) Evaluasi Program Pemagangan dalam Negeri Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja di Provinsi Lampung	Wirawan (2016): a. Input evaluation b. Process evaluation c. Outcome evaluation d. Impact evaluation	Hasil penelitian menunjukkan bahwa a. evaluasi masukan (<i>input evaluation</i>) dalam program pemagangan dalam negeri ini melibatkan sumber daya manusia yang terdiri dari panitia penyelenggara, instruktur dari perusahaan, dan peserta program. Selain itu, dukungan anggaran dan ketersediaan sarana-prasarana, seperti bahan pelatihan, modul, serta perlengkapan kerja lainnya, dinilai cukup memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program. Selanjutnya, b. evaluasi proses (<i>process evaluation</i>) menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan melalui tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan yang mencakup perekrutan peserta dan koordinasi dengan perusahaan, tahap pelaksanaan berupa pelatihan dan bimbingan yang diberikan langsung di perusahaan, dan tahap penutupan yang meliputi pelaporan serta evaluasi menyeluruh terhadap capaian program. Proses ini secara

umum dinilai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis di lapangan.

Pada c. evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Perusahaan memperoleh tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja, sementara peserta merasakan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta mendapatkan fasilitas tambahan berupa uang saku, modul, pakaian kerja, asuransi, dan sertifikat kompetensi. Bagi pemerintah, manfaat utama yang dicapai adalah peningkatan angka penyerapan tenaga kerja yang dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Terakhir, d. evaluasi dampak (*impact evaluation*) menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak jangka panjang yang positif. Bagi perusahaan, alumni program mampu bekerja dengan lebih efisien dan sesuai dengan standar industri. Bagi peserta, program ini membuka akses ke lapangan kerja atau peluang berwirausaha yang sebelumnya tidak tersedia. Dampak ini turut dirasakan oleh pemerintah, yang berhasil menurunkan angka pengangguran di Provinsi Lampung dan meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis keterampilan di daerah tersebut.

-
- | | | | |
|----|---|---|--|
| 2. | Ghina Khairunnisa
(2023) | Dunn (1981): | |
| | Evaluasi Program Dana Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandar Lampung | a. Efektivitas
b. Efisiensi
c. Kecukupan
d. Pemerataan
e. Responsivitas
f. Ketepatan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa a. efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 di Kota Bandar Lampung belum optimal, karena tidak adanya sistem monitoring dan data dokumentasi yang jelas untuk mengetahui ketercapaian program. Pada aspek b. efisiensi , pelaksanaan program ini dinilai cukup efisien karena sumber daya yang tersedia sudah memadai dan dapat |

mendukung pelaksanaan program secara efektif.

Pada aspek c. **kecukupan**, penelitian ini menunjukkan bahwa program BPUM berperan cukup signifikan dalam membantu UMKM menghadapi tantangan selama pandemi COVID-19, dengan dukungan dana yang memadai untuk kebutuhan dasar usaha mikro. Namun, dalam aspek d. **pemerataan**, BPUM belum sepenuhnya merata karena sasaran program belum menjangkau seluruh pelaku usaha yang membutuhkan, terutama yang tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung.

Dalam hal e. **responsivitas**, dinas yang terkait menunjukkan respons yang baik dalam melayani pelaku usaha yang mendaftar program ini, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam proses administrasi. Terakhir, pada aspek f. **ketepatan**, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dana BPUM digunakan secara tidak tepat oleh penerima manfaat, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan program dengan realisasi di lapangan.

- | | | | | |
|----|--|----------|---|---|
| 3. | Ayu Melati(2022) | Riskylia | Tyler Model Evaluasi Goal Oriented Evaluation (1942): | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa a. Tujuan Program Kemitraan PTPN VII adalah untuk membantu perkembangan sektor UMKM di Desa Tanjung Sari melalui bantuan modal, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, dan dukungan fasilitas bagi pelaku usaha. Program ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat setempat serta memajukan usaha kecil dan mikro di daerah sekitar.</p> <p>Dari sisi b. Hasil, penelitian ini menemukan bahwa Program Kemitraan PTPN VII telah memberikan dampak positif dalam bentuk peningkatan keterampilan dan kapasitas usaha bagi para pelaku UMKM. Banyak peserta program melaporkan adanya peningkatan kemampuan dalam mengelola usaha serta kemudahan akses permodalan. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti ketidakdisiplinan dalam</p> |
| | Evaluasi Program Kemitraan PTPN VII dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah | | <p>a. Tujuan</p> <p>b. Hasil</p> <p>c. Sasaran</p> | |

- pembayaran angsuran dan terbatasnya sumber daya manusia untuk memantau perkembangan usaha, yang menjadi hambatan bagi keberlanjutan hasil yang diharapkan.
- Pada aspek c. **Sasaran**, penelitian menunjukkan bahwa sasaran program ini mencakup pelaku usaha kecil dan mikro di wilayah Desa Tanjung Sari. Namun, tidak semua pelaku usaha yang membutuhkan mampu mendapatkan akses penuh terhadap program ini, khususnya karena keterbatasan dana yang tersedia.
- 4 Wiwin Hartanti (2018) *Nakamura dan Smallwood* yaitu: dan
 Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2016
 a. Kepatuhan birokrasi terhadap kebijakan dalam Undang-Undang,
 b. berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program.
 c. Pencapaian tujuan-tujuan program keberhasilan pelaksanaan program.
- Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemagangan dalam negeri di Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena Pelaksanaan Program Pemagangan dalam Negeri tersebut didukung oleh peserta pelatihan yang tepat sasaran, instruktur pelatihan dan pembimbing pemagangan yang berkompetensi dalam melatih dan membimbing peserta pelatihan pemagangan, waktu yang disediakan untuk memberikan informasi dan materi pelatihan bagi peserta pelatihan dimana materi yang diberikan terdiri dari materi teori dan praktek yang lebih dominan dalam pelatihan kerja dan Disnaker Kota Pekanbaru dan didukung oleh sarana dan prasarana serta kordinasi yang baik antara Dinas selaku pelaksana dan BLK serta para penyedia keterampilan.

Sumber: diolah oleh penulis 2024

Hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai program intervensi ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi, seperti program pemagangan, bantuan usaha mikro, dan kemitraan usaha, secara umum memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterampilan, kapasitas usaha, serta ketahanan ekonomi masyarakat. Program pemagangan, misalnya, terbukti efektif dalam menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan kompetensi peserta kerja secara langsung di tempat kerja. Hal ini diperkuat oleh temuan Wiwin Hartanti (2018) dalam penelitiannya tentang Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2016, yang

menunjukkan bahwa keberhasilan pelatihan didukung oleh peserta yang tepat sasaran, instruktur dan pembimbing yang kompeten, materi pelatihan yang dominan bersifat praktis, serta koordinasi yang baik antar-lembaga pelaksana. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan kelembagaan dan kesesuaian program dengan kebutuhan lapangan.

Sementara itu, program bantuan usaha mikro di Kota Bandar Lampung dinilai mampu membantu pelaku usaha kecil dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya sistem pemantauan dan kesenjangan dalam distribusi bantuan. Program kemitraan yang dijalankan oleh PTPN VII juga menunjukkan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM di wilayah pedesaan, namun masih menghadapi kendala dalam menjangkau seluruh target penerima akibat keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun program-program yang dilaksanakan cukup efisien dan relevan, masih diperlukan optimalisasi dalam aspek pemerataan akses, pemantauan berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dan alokasi sumber daya agar dampak program dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan berkelanjutan. Temuan-temuan ini menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam mengevaluasi Program Kartu Prakerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, yang melalui pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) bertujuan menilai secara menyeluruh sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi pencari kerja di daerah.

2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk tindakan administratif negara yang berasal dari kewenangan diskresi, biasanya digunakan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang (Pramono, 2020). Di sisi lain, kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dirancang secara sengaja, terarah, dan terukur oleh pemerintah, melibatkan berbagai pihak terkait di bidang tertentu, serta menghasilkan tujuan yang spesifik (Mansur, 2021). Menurut Meutia (2017),

kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik mencakup berbagai tindakan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah tertentu. Sementara itu, dalam bentuk negatif, kebijakan publik dapat berdampak pada keseluruhan masyarakat (*community as a whole*) dan memiliki sifat memaksa yang tidak dimiliki oleh kebijakan dari organisasi swasta, yang umumnya hanya bersifat internal dan terbatas.

Kebijakan publik biasanya melibatkan sejumlah tahapan atau proses tertentu dalam pembuatannya. Menurut Meutia (2017), proses pembuatan kebijakan publik dapat dibagi ke dalam lima tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Penentuan Agenda, dalam konteks kebijakan publik agenda merujuk pada daftar masalah atau isu yang menjadi perhatian pejabat pemerintah serta pihak-pihak terkait di luar pemerintah. Penentuan agenda bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme dan dinamika suatu kondisi sosial dapat diubah menjadi isu kebijakan yang memerlukan intervensi pemerintah untuk dirumuskan menjadi kebijakan resmi.
- b. Perumusan Kebijakan, perumusan kebijakan mengacu pada proses penyusunan berbagai opsi atau alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Proses ini melibatkan desain dan pengembangan rancangan tujuan kebijakan, serta strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Penetapan Kebijakan, Penetapan kebijakan pada dasarnya merupakan proses pengambilan keputusan atas berbagai alternatif kebijakan yang telah disusun.
- d. Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan, Pelaksanaan kebijakan berhubungan dengan upaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Tahap ini pada dasarnya mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan proses agar kebijakan dapat menghasilkan kondisi yang sesuai dengan perencanaan.
- e. Penilaian atau Evaluasi Kebijakan, Evaluasi kebijakan berkaitan dengan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan kebijakan. Tahap ini berfokus pada analisis terhadap hasil dan dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut.

Proses kebijakan publik merupakan bagian dari hasil penyelenggaraan pemerintahan, selain pelayanan publik, penyediaan barang publik, dan regulasi. Dalam konteks ini, kebijakan publik dapat menghasilkan produk berupa tindakan yang dirancang oleh pemegang kekuasaan, seperti program tertentu. Pelaksanaan program atau kegiatan tersebut merupakan bentuk konkret dari implementasi sebuah kebijakan (Laraswati *et al.*, 2020).

2.3 Tinjauan Tentang Program

Program, menurut Arikunto (1988) dalam Handaru (2017), adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai suatu rancangan yang terstruktur, program mencakup berbagai aktivitas yang dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan spesifik dan menghasilkan dampak yang diinginkan. Tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, program juga dirancang agar keberhasilannya dapat diukur, menjadikannya elemen yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi. Evaluasi terhadap program memungkinkan identifikasi keberhasilan, kelemahan, dan peluang perbaikan untuk memastikan pencapaian tujuan secara efektif.

Prabowo dan Sutiah (2009) menekankan bahwa program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah administrasi yang sama, dengan sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi. Pelaksanaan program memerlukan koordinasi dan urutan yang jelas agar setiap kegiatan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan akhir. Oleh karena itu, evaluasi program menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi apakah seluruh komponen telah berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, program tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga sebagai objek evaluasi yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data. Program juga sering dikaitkan dengan desain atau rancangan, perencanaan dan persiapan. Desain dalam bahasa Inggris disebut *design*. Dalam konteks pembelajaran, desain merujuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana ini sering kali disebut sebagai program pembelajaran (Mudasir, 2012).

Berdasarkan definisi tersebut, program dapat diartikan sebagai suatu rancangan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi masalah

tertentu yang berdampak pada masyarakat secara luas. Program yang efektif adalah program yang dirancang dengan mempertimbangkan seluruh faktor pendukungnya dan dievaluasi. Keberhasilan suatu program bergantung pada kejelasan uraian pekerjaan, tata cara pelaksanaan, kecukupan anggaran, serta kesesuaian waktu pelaksanaan dengan kebutuhan lapangan. Evaluasi program memastikan bahwa tujuan program tercapai, kegiatan berjalan sesuai rencana, dan hasil yang dicapai memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.

2.4 Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

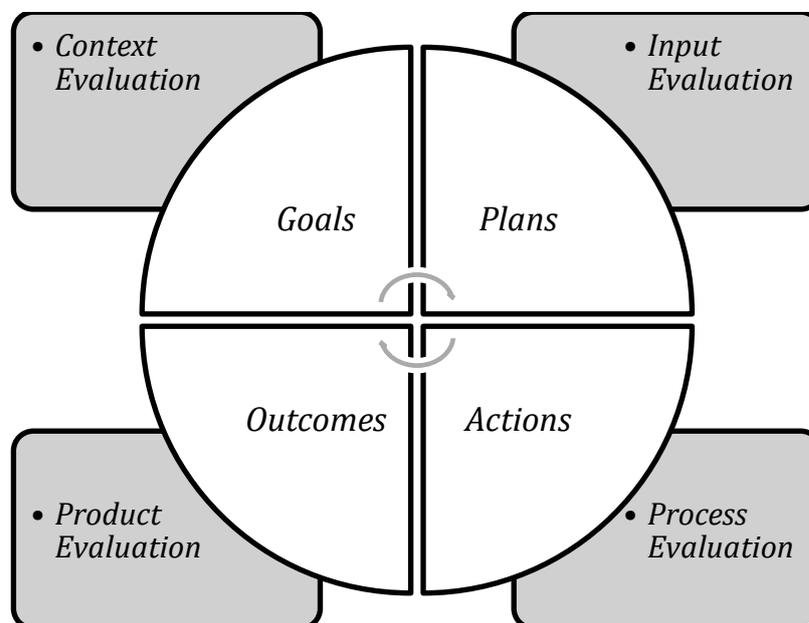
Kebijakan publik tidak dapat dilepaskan begitu saja tanpa melalui proses evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik telah berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaannya. Menurut Charles O. Jones, sebagaimana dikutip oleh Abdoellah dan Rusfiana (2016), evaluasi merupakan proses yang bertujuan untuk menilai manfaat dari sebuah kebijakan. Sementara itu, William N. Dunn (1999) menjelaskan bahwa evaluasi adalah salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik, yang dilakukan setelah tahap perumusan masalah, implementasi kebijakan, serta pengawasan atau monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan.

Secara umum, tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut berhasil dicapai atau tidak. Namun, evaluasi tidak hanya berakhir pada kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Evaluasi juga berfungsi untuk memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar kebijakan, serta membantu dalam melakukan penyesuaian dan merumuskan ulang masalah untuk proses kebijakan berikutnya.

Penelitian ini menggunakan model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dikenal sebagai *CIPP Evaluation Model*. CIPP adalah akronim dari *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap berbagai aspek,

seperti dampak (*impact*), efektivitas (*effectiveness*), keberlanjutan (*sustainability*), dan daya adaptasi (*transportability*). Model ini menerapkan pendekatan evaluasi yang komprehensif, di mana setiap komponen dianalisis sebagai bagian dari sistem secara keseluruhan. Stufflebeam, sebagaimana dikutip oleh Muryadi (2017), menyatakan bahwa tujuan utama evaluasi bukan untuk membuktikan keberhasilan, melainkan untuk memberikan perbaikan yang berkelanjutan.

Menurut Stufflebeam dalam Wirawan (2012), komponen-komponen yang termasuk dalam evaluasi meliputi:



Gambar 4. Stufflebeam (2003) CIPP Model

Sumber: Stufflebeam (2003) diakses pada 13 November 2024

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latar belakang munculnya program (merencanakan keputusan), merumuskan tujuan program atau perlunya mengadakan perubahan dari beberapa subjek yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari objek tertentu yang akan atau sedang berjalan. Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil

keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan dilakukan. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program.

2. Evaluasi Input (*Input Evaluation*)

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya, termasuk bahan, alat, tenaga manusia, dan biaya, yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program yang dirancang. Evaluasi ini berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan rencana strategis program, memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal. Selain itu, evaluasi input membantu dalam menentukan rancangan prosedural yang spesifik agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Informasi dan data yang terkumpul selama proses evaluasi memberikan dasar yang kuat untuk menentukan sumber daya dan strategi terbaik, terutama dalam mengatasi keterbatasan yang ada, sehingga rencana program dapat lebih realistis dan terarah.

3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

- a. Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan program, serta menilai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul. Evaluasi ini memberikan langkah-langkah yang diterapkan dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Worthen dan Sanders dalam Sawitri (2007) menjelaskan bahwa tujuan evaluasi proses meliputi: Mengidentifikasi kelemahan selama pelaksanaan, termasuk tindakan yang berhasil dan perlu dipertahankan.
- b. Memperoleh informasi terkait keputusan-keputusan yang diambil dalam proses implementasi.
- c. Memelihara catatan lapangan yang mencatat tindakan-tindakan penting serta peristiwa kritis yang terjadi selama pelaksanaan program.

4. Evaluasi Hasil (*Product Evaluation*)

Evaluasi hasil bertujuan untuk menilai sejauh mana kelanjutan suatu program, dengan fokus pada hasil yang telah dicapai dan tindakan yang diambil setelah program dilaksanakan. Secara umum, kegiatan evaluasi produk mencakup penetapan tujuan operasional program, penentuan kriteria pengukuran yang

telah tercapai, perbandingan antara realitas di lapangan dengan rumusan tujuan, serta penyusunan interpretasi secara rasional.

Tanpa adanya evaluasi, kebijakan publik tidak dapat diterima begitu saja. Menilai efektivitas kebijakan publik dalam mencapai tujuannya merupakan tujuan utama dari penilaian kebijakan. Oleh karena itu, penilaian menjadi komponen yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik (Winarno, 2012). Setiap model evaluasi memiliki fokus dan konsekuensi yang berbeda terkait aspek yang akan dianalisis dalam evaluasi kebijakan. Selain itu, menurut William N. Dunn (1999), terdapat enam tipe kinerja kebijakan yang perlu dievaluasi, yaitu:

1. Efektivitas, untuk menilai apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai.
2. Efisiensi, untuk menilai sejauh mana upaya yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal.
3. Kecukupan, untuk menilai sejauh mana hasil yang dicapai mampu mengatasi masalah yang ada.
4. Pemerataan, untuk menilai apakah biaya dan manfaat telah dibagikan secara adil dan merata kepada semua kelompok masyarakat.
5. Responsivitas, untuk menilai sejauh mana hasil kebijakan dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan memberikan kepuasan bagi mereka.
6. Ketepatan, untuk menilai apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan manfaat, atau justru sebaliknya.

Selain itu, Jones berpendapat dalam (Tangkilan, 2003) bahwa evaluasi kebijakan publik memerlukan analisis untuk mengurangi dampak negatif yang tidak diinginkan. Dalam proses evaluasi kebijakan, beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab meliputi: "Apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan? Bagaimana kualitas hasil tersebut? Bagaimana respons dari berbagai kelompok masyarakat? Bagaimana kondisi lapangan dan lokasi penerapan kebijakan? Bagaimana dukungan dari legislatif? Apa sikap kelompok-kelompok yang terlibat?" Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir yang sangat penting dalam suatu kebijakan, serta prosedur untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut. Penilaian kebijakan juga berfungsi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan

sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan di masa depan. Untuk melakukan evaluasi kebijakan publik, terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, menurut Abdal (2015), yaitu:

1. Relevansi, evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh aktor kebijakan dan harus dapat menjawab pertanyaan dengan benar pada waktu yang tepat.
2. Signifikan, evaluasi kebijakan harus mampu memberikan informasi baru yang penting bagi pembuat kebijakan, yang melebihi hal-hal yang selama ini dianggap sudah jelas dan dipahami.
3. Validitas, evaluasi kebijakan harus mampu memberikan analisis yang meyakinkan dan objektif mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program tersebut.
4. Reliabilitas, evaluasi kebijakan harus dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang diperoleh melalui prosedur pengukuran yang tidak akurat dan tidak konsisten.
5. Objektivitas, evaluasi kebijakan harus mampu memberikan kesimpulan dan informasi yang objektif dan tidak bias, yaitu informasi yang memungkinkan para evaluator mencapai kesimpulan yang serupa.
6. Ketepatan Waktu, evaluasi kebijakan harus dapat menyediakan informasi yang relevan pada waktu yang tepat.
7. Daya Guna, evaluasi kebijakan harus dapat memberikan informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan serta pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memilih untuk menggunakan model evaluasi dari Daniel Stufflebeam yang mencakup empat kriteria evaluasi yaitu konteks, input, proses, dan produk. Keempat kriteria ini dianggap tepat untuk diterapkan dalam penelitian Evaluasi Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kompetensi Bagi Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Pemilihan indikator ini didasarkan pada temuan awal di lapangan yang menunjukkan adanya hubungan antara kriteria dalam teori Stufflebeam dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program

Kartu Prakerja di Lampung. Setiap indikator tersebut akan dianalisis berdasarkan bagaimana pelaksanaan program dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Selain itu, evaluasi ini akan digunakan untuk melihat sejauh mana Program Kartu Prakerja telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di wilayah penelitian.

2.5 Tinjauan Tentang Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja, yang pertama kali diajukan oleh Presiden Joko Widodo dalam debat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam lima tahun mendatang. Program ini mendapatkan dasar hukum pada Februari 2020 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Pada tahun yang sama, pandemi COVID-19 melanda Indonesia, menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan mempengaruhi perekonomian secara signifikan. Sebagai respons, pemerintah mempercepat pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat yang terdampak. Program ini bertujuan memberikan akses kepada pencari kerja dan pekerja untuk mengikuti pelatihan vokasi, yang meliputi peningkatan keterampilan (*skilling*), pembaharuan keterampilan (*re-skilling*), serta sertifikasi kompetensi kerja.

Peraturan Presiden tersebut menetapkan pembentukan Komite Cipta Kerja yang bertugas merumuskan kebijakan, menyusun strategi, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program. Komite ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Kepala Staf Kepresidenan sebagai wakil ketua, dan melibatkan enam menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dipercayakan kepada *Project Management Office (PMO)* sebagai tim yang bertanggung jawab atas implementasinya. Program ini dirancang sebagai salah satu strategi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia, dengan menyediakan *platform* atau

marketplace yang menghubungkan peserta dengan penyedia pelatihan. Pada tahun 2020, program ini menargetkan 2 juta peserta dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10 triliun.

Warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bekerja atau bersekolah berhak mendaftar untuk mengikuti program ini melalui seleksi. Peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan *voucher* pelatihan senilai lima juta rupiah, yang dapat digunakan untuk mengikuti berbagai pelatihan yang disediakan melalui *platform* digital mitra program. Selain itu, peserta juga akan menerima insentif sebesar enam ratus lima puluh ribu rupiah setiap bulan selama empat bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Program ini juga menyediakan portal pekerjaan yang membantu peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dalam mencari pekerjaan, mendukung mereka untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan baru yang telah diperoleh.

1. Sasaran Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirancang tidak hanya untuk pencari kerja, tetapi juga untuk pekerja, buruh, karyawan, dan pegawai. Dengan kata lain, semua warga negara yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menjalani pendidikan formal, seperti sekolah atau kuliah, dapat mendaftar. Program ini menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, yang menganggap bahwa proses belajar dan pelatihan tidak terbatas oleh usia. Namun, prioritas pendaftaran diberikan kepada pencari kerja muda karena memulai karier di usia muda dapat membuka lebih banyak peluang di masa depan. Sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19, sementara waktu, Kartu Prakerja akan difokuskan pada pekerja dan pelaku usaha mikro/kecil yang terdampak parah dalam kehidupan ekonomi mereka.

Program Kartu Prakerja dilaksanakan dengan memberikan Kartu Prakerja kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu. Kartu ini tidak hanya diberikan kepada pencari kerja, tetapi juga dapat diberikan kepada: a. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK); b. Pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan keterampilan kerja, termasuk mereka yang dirumahkan dan pekerja yang tidak menerima upah, seperti pelaku usaha mikro dan kecil.

Namun, ada ketentuan yang menyatakan bahwa Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada kelompok-kelompok berikut: a. Pejabat Negara; b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); c. Aparatur Sipil Negara (ASN); d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); f. Kepala Desa dan perangkat desa; g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada perusahaan milik negara (BUMN) atau perusahaan milik daerah (BUMD).

Dengan ketentuan ini, Program Kartu Prakerja bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada individu yang benar-benar membutuhkan dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan di dunia kerja.

2. Manfaat dan Tujuan Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, memperbaiki produktivitas dan daya saing, serta mendorong perkembangan kewirausahaan. Tujuan-tujuan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di negara ini. Menurut Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas serta daya saing tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan" (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2020).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing bagi pencari kerja serta pekerja yang terdampak melalui pelatihan vokasional dan kewirausahaan. Manfaat utama dari Kartu Prakerja adalah memberikan dukungan kepada masyarakat yang belum bekerja atau terdampak secara ekonomi, sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, program ini juga memberikan insentif finansial selama masa pelatihan, yang bertujuan untuk mendukung peserta secara ekonomi. Dengan kata lain, "Manfaat utama dari program ini adalah membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau terkena dampak ekonomi agar dapat meningkatkan

kompetensi sesuai kebutuhan industri” (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2020). Dengan akses ke pelatihan berbasis keterampilan secara online dan offline, peserta diharapkan dapat memperluas peluang kerja dan mendorong terciptanya wirausaha baru.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, "Program ini juga diharapkan dapat mengatasi kesenjangan dalam akses pelatihan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas" (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2020). Tujuan jangka panjang program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, menurunkan tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada keterampilan.

2.6 Tinjauan Tentang Kompetensi

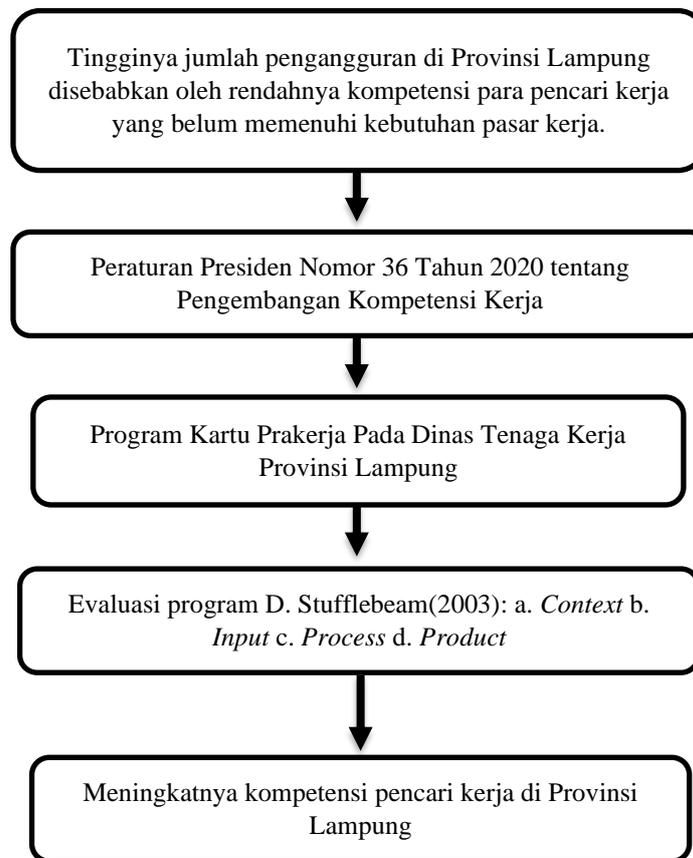
Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Kualitas individu dapat dilihat dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi merujuk pada kemampuan dasar yang diberikan kepada setiap pegawai berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan etos kerja untuk membantu individu mencapai tujuannya dan memberikan hasil terbaik (Anggraini, 2021). Dengan kata lain, kompetensi merupakan dasar utama dari karakteristik seseorang, yang mencakup cara berpikir, berperilaku, menyesuaikan diri dengan situasi, serta mendukung konsistensi tersebut seiring waktu.

Kompetensi angkatan kerja dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik yang dimiliki oleh tenaga kerja, yang dapat memengaruhi kinerja mereka secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, setiap individu atau tenaga kerja perlu memiliki kompetensi yang sesuai, yang dapat diperoleh melalui berbagai pelatihan yang diikuti oleh angkatan kerja.

2.7 Kerangka Pikir

Penelitian ini menggunakan empat indikator utama untuk mengevaluasi peningkatan kompetensi bagi pencari kerja, yaitu Konteks, Input, Proses, dan Produk. Keempat indikator tersebut berfungsi untuk menjawab pertanyaan

penelitian terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan Program Kartu Prakerja dapat meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Lampung. Kerangka berpikir yang digunakan dalam Evaluasi Program Kartu Prakerja untuk Meningkatkan Kompetensi Bagi Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung disusun berdasarkan indikator-indikator tersebut.



Gambar 5. Kerangka Pikir
Sumber: diolah Peneliti, 2024

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan program Kartu Prakerja di Provinsi Lampung. Seperti yang dijelaskan oleh Jauhari (2010:34), penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan dengan jelas dan rinci, tanpa mengubah atau mempengaruhi objek yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada penyajian yang akurat dan terperinci mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian kualitatif dipandang sebagai pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau narasi yang diperoleh melalui observasi terhadap perilaku dan interaksi manusia. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif memanfaatkan konteks alami untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi, dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai (Moleong, 2007:5).

Metode yang umumnya diterapkan dalam penelitian kualitatif mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode ini dipilih dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pendekatan kualitatif lebih efektif dalam menghadapi realitas yang kompleks dan heterogen. Kedua, metode ini memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan di antara keduanya. Ketiga, pendekatan ini lebih responsif dan adaptif terhadap berbagai pengaruh yang mempengaruhi pola nilai yang dihadapi oleh individu (Moleong, 2007: 6).

Alasan lain pemilihan metode ini adalah karena pemahaman terhadap permasalahan sering kali bersifat kualitatif, yang didasarkan pada persepsi individu, eksplorasi ide, serta penjelasan dan pengembangan konsep secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan penjelasan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat Provinsi Lampung dalam mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pelaksanaan penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai alat utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, sejalan dengan sifat fleksibel pendekatan ini yang mengikuti perkembangan pemikiran manusia. Melalui pendekatan tersebut, peneliti diharapkan mampu merespons secara efektif terhadap kondisi dan realitas yang ditemukan di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan batasan yang jelas dalam analisis dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat memahami inti permasalahan dengan lebih mendalam dan efektif. Penentuan fokus yang spesifik memungkinkan penelitian kualitatif ini untuk menyaring data yang relevan dan mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan, seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2007: 6). Fokus utama dari penelitian ini adalah Evaluasi Program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Lampung.

Untuk mengevaluasi Program Kartu Prakerja, penelitian ini menggunakan empat aspek utama dalam mengevaluasi yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam. Berikut merupakan uraian mengenai fokus penelitian ini.

1. Konteks (*Context*)

Menganalisis relevansi program Kartu Prakerja dalam menjawab kebutuhan pencari kerja di Provinsi Lampung. Aspek ini mencakup pemahaman tentang masalah pengangguran dan kebutuhan akan kompetensi tertentu di Lampung yang menjadi latar belakang program.

2. Masukan (*Input*)

Mengevaluasi sumber daya yang mendukung pelaksanaan program, termasuk kurikulum pelatihan dan sarana pendukung lainnya. Penilaian ini akan mengukur sejauh mana input yang disediakan sesuai dengan kebutuhan program.

3. Proses (*Process*)

Menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja di Provinsi Lampung. Fokus pada aspek ini mencakup kesesuaian antara rencana dan praktik, tantangan dalam pelaksanaan, serta efektivitas proses pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja.

4. Hasil (*Product*)

Meninjau hasil yang dicapai program, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing pencari kerja di Lampung. Penilaian ini akan melihat apakah ada perubahan positif dalam kompetensi peserta dan apakah tujuan utama program dalam menurunkan pengangguran mulai tercapai.

Dengan empat aspek utama tersebut, penelitian ini akan mengkaji Program Kartu Prakerja yang telah berhasil dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Lampung.

3.3 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung karena lembaga ini memiliki peran utama dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja di daerah tersebut. Sebagai instansi pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab dalam mengelola dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan program ini, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menjadi lokasi yang tepat untuk penelitian ini.

Dinas ini memiliki kewenangan tidak hanya dalam aspek administratif dan operasional Program Kartu Prakerja, tetapi juga berperan dalam sosialisasi, pelaksanaan pelatihan, dan pemantauan efektivitas program di tingkat provinsi. Oleh karena itu, memilih Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung sebagai lokasi penelitian memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai implementasi program serta tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan, sementara data lainnya berupa informasi tambahan seperti dokumen dan sejenisnya. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari informan, sementara data sekunder diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya.

1. Data Primer

Wawancara yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian atau di lapangan menghasilkan data primer. Metode pengumpulan data ini memperoleh informasi langsung dari sumber data melalui pertanyaan atau percakapan dengan satu atau lebih individu yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah metode pengumpulan informasi dari sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang terkumpul kemudian dianalisis, dibandingkan, dan digabungkan untuk menghasilkan analisis yang terstruktur, kohesif, dan menyeluruh.

Sumber data utama pada penelitian ini berupa informasi verbal diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan, yang membahas berbagai isu terkait evaluasi Program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Lampung. Wawancara ini dilakukan dengan individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan program, yaitu pihak-pihak terkait di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.

3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

Peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data konkret yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena

tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data (Sugiyono, 2016). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan pihak terkait, melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah metode semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur memungkinkan subjek yang diwawancarai memberikan jawaban secara bebas tanpa batasan (Sugiyono, 2016). Wawancara dilakukan dengan pedoman wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan informasi yang diperlukan untuk memperdalam hasil penelitian.

Proses wawancara dimulai dengan kesepakatan antara peneliti dan informan mengenai waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara. Selain itu, peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan tambahan di luar pedoman untuk menggali informasi lebih dalam selama sesi wawancara. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan informan direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara pada ponsel, dan peneliti juga mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh informan selama wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Eka Saputra, S.E.	Fungsional Perencana Ahli Pertama	17 Februari 2025
2	Sri Maryati, S.E.	Staff	17 Februari 2025
3	Hanip Khoiruddin	Kepala Lembaga Pelatihan	22 April 2025
4	Ade Satria	Peserta Pendaftar Kartu Prakerja 2022	18 Februari 2025
5	Septian Putra	Peserta Pendaftar Kartu Prakerja 2022	18 Februari 2025
6	Muhammad Abdul Rahman	Peserta Pendaftar Kartu Prakerja 2023	18 Februari 2025
7	Arif Imran	Pengguna Kartu Prakerja	26 Mei 2025

Sumber: diolah Peneliti, 2025

2. Dokumen

Menurut Sugiyono (2016), dokumen adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya penting dari seseorang. Menurut Usman dan Akbar (2008), penggunaan dokumentasi memiliki keuntungan, di antaranya biaya yang relatif rendah, serta efisiensi waktu dan tenaga. Namun, kelemahannya adalah data yang diambil dari dokumentasi cenderung sudah lama, dan jika terdapat kesalahan dalam pencetakan, maka peneliti juga bisa mengambil data yang salah.

Tabel 3. Daftar Dokumen yang berkaitan dengan penelitian

No.	Nama Dokumen	Substansi Dokumen
1.	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja	Memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja, termasuk definisi program, tujuan, penerima manfaat, manfaat program, pelaksanaan program, dan ketentuan tambahan.
2.	Laporan Manajemen Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2020-2022	Laporan ini merangkum pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama periode 2020-2022, termasuk aspek perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Laporan mencakup data terkait jumlah penerima manfaat, serta jenis pelatihan yang ditawarkan.
3.	Dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	Mengetahui rencana strategis program kartu prakerja di provinsi lampung.
4.	Profil Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Sumber: diolah Peneliti, 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan mengorganisasi data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis. Proses ini mencakup pengkategorian data, pemecahan menjadi unit-unit, penyintesisan, penyusunan pola, pemilihan informasi yang penting untuk dipelajari, serta pembuatan kesimpulan agar data mudah dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016).

Proses analisis dilakukan terhadap rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan diklasifikasikan, kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif dengan menyusunnya dalam bentuk narasi kalimat untuk memperoleh jawaban. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam diproses dan dianalisis kualitatif

melalui reduksi data dan interpretasi. Data yang terkumpul kemudian ditulis dalam bentuk transkrip, dilakukan pengkategorian dengan mereduksi data yang relevan, dan akhirnya diinterpretasikan sesuai dengan fokus penelitian.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyaring, memilih, dan menyoroti hal-hal yang utama, serta memfokuskan pada aspek-aspek yang penting (Sugiyono, 2016). Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) disusun dalam laporan yang lengkap dan terperinci, dengan analisis yang tajam, mengelompokkan, mengarahkan, menghapus informasi yang tidak relevan, dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat dihasilkan dan diverifikasi.

Peneliti melakukan reduksi data terhadap informasi yang diperoleh dan sekaligus memverifikasi keabsahan data melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memeriksa data dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya serta mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Menurut Sugiyono (2016), penyajian data dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, secara teknis, data yang telah diorganisir ke dalam metrik analisis data akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel, dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis data. Meskipun merupakan tahap akhir, kesimpulan tetap diverifikasi seiring bertambahnya data yang diperoleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul

dan dikategorikan kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan dan dianalisis secara kualitatif, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas, yang kemudian disusun dalam kesimpulan sementara.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data berarti mengetahui validitas dari suatu data yang disajikan, Menurut Sugiyono (2016), dalam penelitian kualitatif validitas ialah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian atau data yang sesungguhnya dengan data yang disajikan oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini yang diuji adalah data yang diperoleh peneliti. Untuk itu terdapat beberapa Teknik uji keabsahan data menurut Sugiyono (2016) seperti:

a. Uji Kredibilitas

Data Uji kredibilitas data dimaksudkan untuk menanamkan keyakinan terhadap temuan penelitian yang diperoleh melalui triangulasi data. Triangulasi digambarkan sebagai metode pengumpulan data yang mengintegrasikan banyak metode pengumpulan data dengan sumber-sumber yang ada. Jika seorang peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan triangulasi, dia mengumpulkan data yang sekaligus memeriksa kehandalan data dengan menggunakan beberapa metodologi pengumpulan data dan sumber data.

1. Triangulasi

Triangulasi didefinisikan sebagai Teknik mengumpulkan data dengan cara penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila data dikumpulkan oleh peneliti menggunakan triangulasi, maka peneliti sesungguhnya telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.

b. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas ekseternal dalam penelitian kualitatif, validitas ini menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya kedalam populasi penelitian dimana sampel tersebut diambil. Pada dasarnya, *transferability* adalah validitas eksternal penelitian. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk membantu

orang lain memahami hasil penelitian. Peneliti perlu memberikan penjelasan yang detail, jelas, sistematis, dan terpercaya saat membuat laporan.

c. Uji *Dependability*

Pada penelitian kualitatif, *dependability* juga disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah jika orang lain mampu mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Proses ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

d. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* disebut juga dengan uji objektivitas dalam penelitian. Penelitian yang objektif bila hasil penelitian tersebut telah disepakati banyak orang. Dalam uji *confirmability* berarti mengaitkan hasil penelitian dengan proses yang dilakukan. Uji konfirmabilitas dapat diperoleh dengan persetujuan dari beberapa orang, termasuk dosen pembimbing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, dalam hal ini data yang dibutuhkan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai pelaksanaan program. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Evaluasi Konteks

Program Kartu Prakerja di Provinsi Lampung hadir sebagai respons terhadap tingginya angka pengangguran serta kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Meskipun program ini telah memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi mereka, belum semua pelatihan yang tersedia benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian lebih lanjut agar program ini lebih efektif dalam menjawab kebutuhan industri di Lampung.

2. Evaluasi Input

Implementasi Program Kartu Prakerja di Lampung telah memiliki perencanaan yang sistematis, dengan sumber daya berupa anggaran, kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan, serta penggunaan platform daring sebagai media pembelajaran. Namun, masih terdapat kendala dalam akses pelatihan, terutama bagi peserta yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan akses internet. Selain itu, belum semua penyedia pelatihan menawarkan materi yang benar-benar aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Lampung.

3. Evaluasi Proses

Proses pelaksanaan Program Kartu Prakerja berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari pendaftaran, seleksi, pemilihan pelatihan,

pelaksanaan pelatihan, hingga pemberian insentif. Namun, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya pendampingan dalam pembelajaran daring, sehingga peserta sering mengalami kesulitan dalam memahami materi secara mandiri. Selain itu, tidak semua peserta dapat menyelesaikan pelatihan karena kendala teknis maupun keterbatasan waktu yang mereka miliki.

4. Evaluasi Produk

Program Kartu Prakerja telah berhasil memberikan manfaat bagi sebagian peserta, terutama dalam meningkatkan keterampilan mereka di berbagai bidang seperti digital marketing, kewirausahaan, dan keterampilan teknis lainnya. Namun, keberhasilan program ini dalam menurunkan angka pengangguran masih belum maksimal. Beberapa peserta yang telah menyelesaikan pelatihan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman kerja serta terbatasnya lowongan kerja di daerah mereka. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyaluran kerja yang lebih baik untuk memastikan lulusan program ini benar-benar bisa terserap dalam dunia kerja.

Dengan berbagai temuan tersebut, Program Kartu Prakerja di Provinsi Lampung telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kompetensi pencari kerja, namun masih memerlukan berbagai perbaikan dalam aspek penyelenggaraan, aksesibilitas, serta efektivitas dalam menyalurkan peserta ke dunia kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Kartu Prakerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelatihan

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung perlu memastikan bahwa pelatihan yang disediakan dalam Program Kartu Prakerja benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri di Lampung. Evaluasi terhadap kurikulum pelatihan harus dilakukan secara berkala agar materi yang diajarkan lebih adaptif dan memiliki dampak nyata terhadap kesiapan kerja peserta.

2. Peningkatan Aksesibilitas Pelatihan

Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan bagi peserta yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet. Alternatif seperti pelatihan luring atau blended learning (kombinasi daring dan luring) dapat menjadi solusi untuk memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti program.

3. Penguatan Pendampingan dan Bimbingan

Program ini perlu menambahkan sistem pendampingan atau mentor bagi peserta selama proses pelatihan, terutama bagi mereka yang kesulitan dalam memahami materi secara mandiri. Pendampingan ini dapat berupa sesi konsultasi dengan instruktur atau penyediaan forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan pemecahan masalah.

4. Optimalisasi Sistem Penyaluran Kerja

Agar peserta lebih mudah mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, dunia industri, dan penyedia pelatihan. Program ini dapat dilengkapi dengan mekanisme penyaluran tenaga kerja, seperti job matching, program magang, atau kemitraan dengan perusahaan lokal yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu.

5. Evaluasi dan Pemantauan Berkala

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung harus melakukan evaluasi berkala terhadap Program Kartu Prakerja, termasuk mengumpulkan umpan balik dari peserta dan penyedia pelatihan. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, pemerintah dapat lebih mudah mendeteksi permasalahan dalam program dan segera mengambil langkah perbaikan yang diperlukan.

6. Penyediaan Bantuan Teknis bagi Peserta

Mengingat sebagian peserta mengalami kesulitan teknis dalam mengakses platform pelatihan daring, pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan teknis yang responsif. Hal ini dapat berupa hotline atau pusat bantuan daring yang siap memberikan solusi cepat terhadap kendala teknis yang dihadapi peserta.

7. Penyesuaian Kurikulum Pelatihan dengan Kebutuhan Industri Secara Lebih Spesifik

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung perlu memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri lokal dalam merancang dan mengembangkan kurikulum pelatihan Program Kartu Prakerja. Dengan melibatkan dunia usaha secara aktif sejak tahap perencanaan, materi pelatihan akan lebih sesuai dengan keterampilan teknis dan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan di lapangan. Selain itu, pelibatan industri dalam proses pelatihan, seperti melalui magang atau praktik kerja langsung, dapat meningkatkan relevansi dan kesiapan peserta menghadapi tuntutan pasar kerja yang dinamis. Pendekatan ini akan memastikan lulusan pelatihan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di tempat kerja.

Dengan saran-saran ini, diharapkan Program Kartu Prakerja dapat lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Provinsi Lampung, sehingga berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, M. (2015). *Manajemen pelatihan kerja*. Rajawali Pers.
- Abdoellah, R., & Rusfiana, A. (2016). *Pengantar administrasi publik*. CV Pustaka Setia.
- Anggraini, L. (2021). Evaluasi kebijakan pelatihan kerja dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 45–56.
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. PT Rineka Cipta.
- Aslinda, A. (2023). *Model kebijakan publik dan teori perubahan kebijakan*. Deepublish.
- Asmiati. (2022). *Evaluasi program pemagangan dalam negeri sebagai upaya peningkatan kompetensi pencari kerja di Provinsi Lampung tahun 2021* [Skripsi, Universitas Lampung].
- Badan Pusat Statistik. (2023, November 6). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,32 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,18 juta rupiah per bulan*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Lampung dalam angka 2023*. <https://lampung.bps.go.id/publication.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024, Mei 6). *Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,12 persen*. <https://lampung.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/1220/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--februari-2024-sebesar-4-12-persen--turun-sebesar-0-06-persen-poin-dibandingkan-dengan-februari-2023.html>
- Consuello, Y. (2020). Analisis efektivitas Kartu Prakerja di tengah pandemi COVID-19. *Jurnal Pengurus Moot Court Community (MCC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

- Darmasih, I. (2022). *Pelaksanaan program Kartu Prakerja dalam meningkatkan produktivitas bagi pencari kerja (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung].
- Databoks. (2023, Mei 5). *Awal 2023 ada 7,9 juta pengangguran di Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/05/awal-2023-ada-79-juta-pengangguran-di-indonesia>
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (2020). *Pedoman pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas*. Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 83–88.
- Dunn, W. N. (1999). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Terj. Samodra Wibawa et al.). Gadjah Mada University Press.
- Ekon.go.id. (2024). *Program Kartu Prakerja*. <https://www.ekon.go.id/>
- Firnanda, A. (2021). Evaluasi kebijakan Kartu Prakerja ditinjau dari asas kemanfaatan dan aksesibilitas. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 115–127.
- Ghina Khairunnisa. (2023). *Evaluasi Program Dana Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bandar Lampung* [Skripsi, Universitas Lampung].
- Handaru, A. (2017). Evaluasi program pelatihan kerja dalam meningkatkan keterampilan pencari kerja. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 5(2), 134–145.
- Hartanti, W. (2018). Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Indonesiabaik.id. (n.d.). *Jumlah pengangguran di Indonesia terus berkurang*. <https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang>
- Intan Fitri Meutia. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung; AURA (CV. Anugrah Utama Raharja)
- Intan Fitri Meutia. 2017. *Reformasi Administrasi Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Jauhari, M. (2010). *Dasar-dasar ilmu administrasi*. Rineka Cipta.

- Laraswati, A., et al. (2020). Efektivitas program Kartu Prakerja terhadap pengembangan kompetensi pencari kerja. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 49–60.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan publik: Cara mudah memahami kebijakan publik*. Gava Media.
- Mangkunegara, A. P. (2013). Kompetensi dan motivasi terhadap kinerja anggota reskrim. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Risiko*, 1(1), 1–10.
- Mansur, H. (2021). Manajemen Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 145–155.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif* (Ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. terbaru). Remaja Rosdakarya.
- Mudasir. (2012). *Dasar-dasar penelitian kualitatif*. Andi Offset.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik: Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis bukti untuk pelayanan publik*. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan, kebijakan sebagai ilmu dan masalah sosial di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Palan, R. (2007). *Competency management: A practitioner's guide*. Infinity Books.
- Prabowo, S., & Sutiah. (2009). Evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 23–34.
- Prakerja.go.id. (2024). *Informasi resmi program Kartu Prakerja*. <https://www.prakerja.go.id/>
- Pramono, B. (2020). Kebijakan Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 50–61.
- Prasetyo, A. (2019). *Kebijakan pelatihan kerja berbasis kompetensi*. Prenadamedia Group.

- Predianto, T., & Khoirurrosyidin. (2020). Mengkaji upaya pemerintah melalui kebijakan Kartu Prakerja dalam perspektif pemberdayaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 91–98.
- Riskyliya Melati, A. (2022). *Evaluasi Program Kemitraan PTPN VII dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah* [Skripsi, Universitas Lampung].
- Saifuddin, M. (2004). *Mengelola kompetensi: Teori dan aplikasi dalam manajemen*. Gramedia.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31–62). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0309-4_4
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, dan kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tangkilan, L. (2003). *Administrasi publik*. Grasindo.
- Usman, H., & Akbar, M. (2006). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.
- Wijayanti, R. (2020). Optimalisasi kebijakan Kartu Prakerja dengan pelatihan branding strategy. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 60–68.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*. Rajawali Pers.
- Wood, R., & Others. (2001). *The dynamics of competence in organizations*. Sage Publications.